



GUBERNUR MALUKU

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Bab I Huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk/menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);

19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022, dengan contoh tandatangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2022

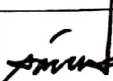
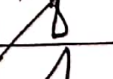
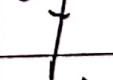
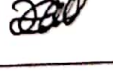
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

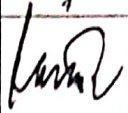
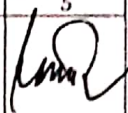
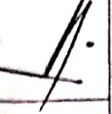
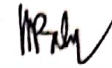
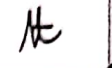
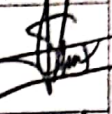
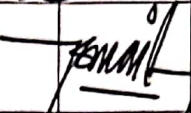
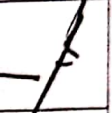
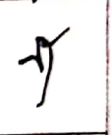
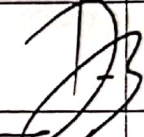
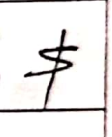
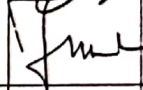
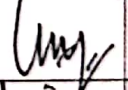
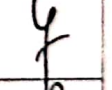
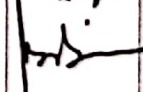
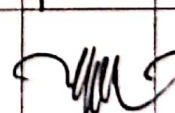
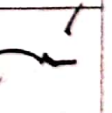
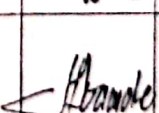


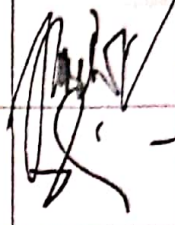
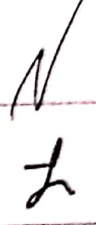
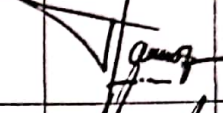
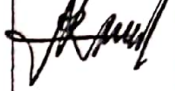
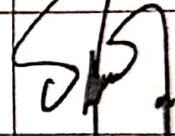
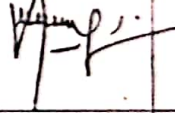
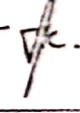
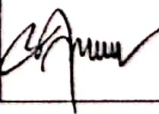
TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
7. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
8. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
9. Para Bupati/Walikota Se-Maluku;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ambon di Ambon;
11. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
12. Kepala Kantor Wilayah XXIX Ditjen Anggaran Ambon di Ambon;
13. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Maluku di Ambon;
14. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Ambon;
15. Direktur Utama PT. Bank Maluku di Ambon;
16. Bendahara Pengeluaran di Ambon;
17. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNG JAWABAN DALAM SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SATUAN KERJA/UNIT ANGGARAN	NAMA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<u>Ir. Sadali Ie, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/d) NIP. 19680828 199403 1 010		
2.	Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Maluku	<u>Ir. Sadali Ie, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/d) NIP. 19680828 199403 1 010		
3.	Sekretariat DPRD Provinsi Maluku	<u>Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19750504 199311 1 002		
4.	Dinas Pertanian Provinsi Maluku	<u>Ir. Djasmin Badijak</u> Pembina Utama Tk. I (IV/b) NIP. 19640102 199103 1 018		
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku	<u>DR. Abdul Haris, S.Pi., M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680215 199403 1 010		
6.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku	<u>Said Latupono, ST, M.Si</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19700821 199103 1 014		
7.	Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	<u>Ir. Sadali, IE, M.Si</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19680828 199403 1 010		
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	<u>Elvis Pattiselanno, SE, M.Si</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620114 198803 1 008		
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Maluku	<u>Drs. Mohammad Nasir Kilkoda</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590421 199203 1 004		
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku	<u>Endang Diponegoro, S.P., M.M</u> Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19630929 198902 1 003		
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	<u>dr. Zulkarnaini, M.S.Sp.JP.FIHA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19761231 200212 1 028		
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku	<u>Daniel Edward Indey, S.Sos.M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681210 198902 1 002		

NO	SATUAN KERJA/UNIT ANGGARAN	NAMA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	<u>Drs. Samuel Estefanus Huwae, M.H</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19691111 199510 1 001		
14.	Dinas Sosial Provinsi Maluku	<u>Sartono Pining, S.H, M.Kn</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620523 199303 1 004		
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku	<u>DR. M. Marasabessy, ST., M.Tech</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19671104 199803 1 009		
16.	Dinas Perhubungan Provinsi Maluku	<u>Dr. Muhammad Malawat, ST, MT</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19721029 199803 1 002		
17.	Dinas Pariwisata Provinsi Maluku	<u>Dr. Ir. Markus J. Pattinama, DEA</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620201 199002 1 003		
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku	<u>Ir. Ismail Usemahu, MT</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650413 199303 1 009		
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku	<u>Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19650204 199103 1 013		
20.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	<u>Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19660708 199803 1 003		
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	<u>Dr. Ir. Insum Sangadji, M.Si</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19610704 199203 2 001		
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku	<u>Sandi Alessander Wattimena, ST, MT</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680308 199603 1 004		
23.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	<u>Ir. Luthfi Rumbia, M.T</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630310 198908 1 001		
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku	<u>Drs. Mustafa Sangadji, M.M</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630617 198803 1 018		
25.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku	<u>Denny Donald Lilipory, ST., M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19641013 199703 1 006		
26.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku	<u>Dra. Halimah T. Soamole, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650813 199209 2 001		

NO	SATUAN KERJA/UNIT ANGGARAN	NAMA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku	<u>DR. Anton A. Lailossa, ST,M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700208 199803 1 010		
28.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku	<u>Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19640128 199311 1 001		
29.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku	<u>Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi,M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710212 199803 1 012		
30.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku	<u>Drs. Hadi, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690314 198902 1 002		
31.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku	<u>Drs. Jasmono, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19741226 199412 1 003		
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	<u>Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19710924 199101 1 003		
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku	<u>Hendry Morton Far Far, S.H</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19620707 199211 1 001		
34.	Badan Penghubung Provinsi Maluku	<u>Saiful Indra Patta, S.STP, M.Si</u> Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810518 200112 1 005		
35.	Badan Pengelola Perbatasan Negara Provinsi Maluku	<u>Dra. Poppy Bachmid</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630616 199003 2 008		
36.	Inspektorat Provinsi Maluku	<u>Dra. Rosida Soamole, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620123 199402 2 001		
37.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku	<u>Drs. Jones A. Adrianz, M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19750321 199311 1 001		

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

